

PERAN DPR RI DALAM HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI INTERNASIONAL MELALUI DIPLOMASI PARLEMEN

Nicholas Syahputra Hutahaean

ABSTRAK

Perkembangan globalisasi telah mendorong keterlibatan berbagai aktor dalam hubungan internasional, tidak hanya pemerintah, tetapi juga lembaga legislatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran DPR RI dalam hubungan dengan organisasi internasional melalui diplomasi parlemen. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan studi literatur terhadap berbagai sumber ilmiah dan dokumen resmi. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa DPR RI menjalankan peran hubungan internasional secara institusional melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), yang berfungsi sebagai penghubung utama dengan parlemen negara lain dan organisasi internasional. Melalui partisipasi aktif dalam forum antarpallemen seperti *Inter-Parliamentary Union* dan *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly*, DPR RI tidak hanya berperan sebagai representasi rakyat di tingkat global, tetapi juga berkontribusi dalam pembahasan isu-isu strategis internasional serta pembentukan kerja sama global. Diplomasi parlemen yang dijalankan memiliki karakteristik yang lebih fleksibel dan dialogis, sehingga mampu melengkapi diplomasi pemerintah. Dengan demikian, hubungan DPR RI dengan organisasi internasional melalui diplomasi parlemen bersifat aktif, strategis, dan berkontribusi dalam memperkuat posisi Indonesia dalam sistem hubungan internasional.

Kata Kunci: DPR RI, Diplomasi Parlemen, BKSAP, Organisasi Internasional, Hubungan Internasional

ABSTRACT

The development of globalization has encouraged the involvement of various actors in international relations, not only governments but also legislative institutions. This study aims to analyze the role of the Indonesian House of Representatives (DPR RI) in its relations with international organizations through parliamentary diplomacy. The method used is a qualitative approach with a literature study based on various academic sources and official documents. The results show that the DPR RI carries out its international relations role institutionally through the Inter-Parliamentary Cooperation Body (BKSAP), which functions as the main liaison with other national parliaments and international organizations. Through active participation in inter-parliamentary forums such as the Inter-Parliamentary Union and the ASEAN Inter-Parliamentary Assembly, the DPR RI not only acts as a representative of the people at the global level but also contributes to discussions on strategic international issues and the establishment of global cooperation. The parliamentary diplomacy conducted has more flexible and dialogical characteristics, enabling it to complement government diplomacy. Thus, the relationship between the DPR RI and international organizations through parliamentary diplomacy is active, strategic, and contributes to strengthening Indonesia's position in the international relations system.

Keywords: DPR RI, Parliamentary Diplomacy, BKSAP, International Organizations, International Relations

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi telah mendorong intensitas hubungan antarnegara menjadi semakin kompleks dan saling bergantung dalam berbagai aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Hubungan internasional tidak lagi hanya dijalankan oleh pemerintah sebagai aktor utama, tetapi juga melibatkan aktor non-eksekutif, termasuk lembaga legislatif. Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam praktik diplomasi modern, dari yang semula bersifat *state-centric* menjadi lebih inklusif melalui pendekatan multi-jalur. Diplomasi parlemen muncul sebagai salah satu instrumen penting yang memungkinkan parlemen berperan aktif dalam hubungan internasional melalui dialog, kerja sama, serta pertukaran gagasan antarnegara (Marzuki, e al., 2025). Diplomasi parlemen dipahami sebagai aktivitas internasional yang dilakukan oleh parlemen untuk membangun komunikasi dan kerja sama dengan parlemen negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral. Keberadaan diplomasi parlemen tidak dimaksudkan untuk menggantikan diplomasi pemerintah, melainkan sebagai pelengkap yang memperkuat kebijakan luar negeri suatu negara. Keterlibatan parlemen dalam urusan internasional juga terus mengalami peningkatan, seiring dengan kebutuhan akan legitimasi demokratis dalam pengambilan kebijakan global serta pentingnya representasi suara rakyat dalam forum internasional (Ainurrofiq & Kurniawan, 2022).

Di Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tidak hanya menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran di tingkat domestik, tetapi juga memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan politik luar negeri. Hal ini secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), khususnya Pasal 69 ayat (2), yang menegaskan bahwa pelaksanaan fungsi DPR RI dijalankan dalam kerangka representasi rakyat serta untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (dpr.go.id 2026). Untuk itu keterlibatan DPR RI dalam hubungan internasional memiliki landasan hukum yang jelas dan menjadi bagian integral dari sistem ketatanegaraan Indonesia.

Implementasi peran tersebut diwujudkan melalui diplomasi parlemen yang dijalankan secara institusional, terutama melalui Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) sebagai alat kelengkapan DPR RI. BKSAP memiliki fungsi untuk membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan serta kerja sama antara DPR RI dengan parlemen negara lain maupun organisasi internasional, baik secara bilateral maupun multilateral. Melalui BKSAP, DPR RI berperan aktif dalam berbagai forum internasional seperti *Inter-Parliamentary Union* (IPU) dan *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA), yang menjadi wadah strategis dalam membahas isu-isu global dan memperkuat kerja sama antarparlemen.

Diplomasi parlemen Indonesia telah memberikan kontribusi nyata dalam hubungan internasional, baik di tingkat regional maupun global, DPR RI melalui forum-forum internasional tersebut tidak hanya berfungsi sebagai representasi politik, tetapi juga sebagai aktor yang turut membentuk opini dan kebijakan global melalui pendekatan dialogis dan kolaboratif. Keterlibatan

ini mencerminkan semakin pentingnya peran parlemen dalam mendukung diplomasi negara serta memperkuat posisi Indonesia dalam percaturan internasional. Selain itu, diplomasi parlemen juga memiliki karakteristik yang relatif lebih fleksibel dibandingkan diplomasi pemerintah, karena tidak sepenuhnya terikat oleh protokol formal kenegaraan. Hal ini memungkinkan terciptanya komunikasi yang lebih terbuka dan konstruktif antaraktor internasional.

DPR RI juga memanfaatkan diplomasi parlemen untuk merespons berbagai isu global, termasuk isu kemanusiaan dan konflik internasional. Salah satu contohnya adalah keterlibatan DPR RI dalam mengangkat isu pelanggaran hak asasi manusia terhadap etnis Rohingya di Myanmar dalam berbagai forum internasional. Pada kasus ini DPR RI secara aktif mendorong pembahasan isu tersebut di tingkat global, termasuk melalui forum IPU dan AIPA, sebagai bagian dari upaya diplomasi parlemen dalam memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan (Ainurrofiq & Kurniawan, 2022). Keterlibatan DPR RI dalam isu Rohingya tersebut menunjukkan bahwa diplomasi parlemen tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap diplomasi pemerintah, tetapi juga dapat menjadi instrumen strategis dalam merespons isu-isu global yang bersifat sensitif dan kompleks. Bahkan dalam beberapa kondisi diplomasi parlemen dapat berperan lebih progresif dalam menyuarakan kepentingan kemanusiaan dan aspirasi publik, terutama ketika diplomasi pemerintah cenderung berhati-hati karena pertimbangan politik dan prinsip hubungan internasional, seperti prinsip non-intervensi dalam kerangka kerja sama regional.

DPR RI melalui diplomasi parlemen memiliki peran yang semakin signifikan dalam hubungan dengan organisasi internasional. Peran ini tidak hanya terbatas pada aktivitas seremonial, tetapi juga mencakup kontribusi substantif dalam pembahasan isu global, pembentukan opini internasional, serta penguatan kerja sama antarnegara. Oleh karena itu, kajian mengenai peran DPR RI dalam hubungan dengan organisasi internasional melalui diplomasi parlemen menjadi penting untuk memahami sejauh mana kontribusi lembaga legislatif dalam mendukung politik luar negeri Indonesia di era globalisasi. Berdasarkan uraian tersebut, penulisan ini akan membahas mengenai peran DPR RI dalam hubungan dengan organisasi internasional melalui diplomasi parlemen, serta bagaimana BKSAP menjalankan fungsi strategisnya dalam mendukung pelaksanaan hubungan internasional tersebut.

PEMBAHASAN

Konsep dan Teori Diplomasi Parlemen

Perkembangan hubungan internasional modern menunjukkan bahwa diplomasi tidak lagi menjadi domain eksklusif pemerintah (eksekutif), melainkan telah melibatkan berbagai aktor, termasuk lembaga legislatif. Diplomasi parlemen merupakan aktivitas hubungan internasional yang dilakukan oleh lembaga legislatif dalam rangka membangun komunikasi, kerja sama, serta memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat global. Diplomasi ini dilakukan melalui berbagai forum internasional, kerja sama bilateral maupun multilateral, serta interaksi antarparlemen. Diplomasi parlemen merupakan bagian dari diplomasi negara, tetapi dijalankan oleh lembaga

legislative yang berfungsi sebagai pelengkap diplomasi pemerintah dengan mengedepankan dialog, negosiasi, dan representasi rakyat (Rizkiah & Burhanuddin, 2024). Diplomasi parlemen berperan dalam memperkuat hubungan internasional melalui pendekatan yang lebih dialogis dan partisipatif. Meskipun sama-sama bertujuan menjaga hubungan internasional, terdapat perbedaan mendasar antara diplomasi parlemen dan diplomasi pemerintah:

Aspek	Diplomasi Pemerintah	Diplomasi Parlemen
Aktor	Eksekutif (Presiden, Kemenlu)	Legislatif (Parlemen)
Sifat	Formal & protokoler	Lebih fleksibel
Output	Perjanjian resmi	Rekomendasi, resolusi
Pendekatan	Negosiasi formal	Dialog & komunikasi politik
Dampak	Langsung (konkret)	Tidak langsung (jangka panjang)

Diplomasi parlemen cenderung lebih fleksibel karena tidak terlalu terikat oleh protokol kenegaraan, sehingga memungkinkan komunikasi yang lebih terbuka dan konstruktif (Pusbangkom DPR RI, 2026). Diplomasi parlemen merupakan bagian dari konsep *multi-track diplomacy*, yaitu pendekatan hubungan internasional yang melibatkan berbagai jalur (aktor), tidak hanya pemerintah. Pada konsep ini, diplomasi terbagi menjadi beberapa jalur, di antaranya:

- a. Track 1 : Pemerintah (diplomasi resmi)
- b. Track 2 : Non-pemerintah (akademisi, NGO)
- c. Track 1.5 : Gabungan pemerintah dan non-pemerintah
- d. Track Parlemen : DPR/legislatif

Diplomasi parlemen sering dikategorikan sebagai *second track diplomacy*, atau *track 1.5 diplomacy*, karena berada di antara formalitas negara dan representasi masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa parlemen memiliki posisi strategis dalam menjembatani kepentingan negara dan masyarakat dalam hubungan internasional. Diplomasi parlemen memiliki beberapa fungsi utama, yaitu:

1. Fungsi representasi, mewakili suara dan kepentingan rakyat di forum internasional
2. Fungsi dukungan kebijakan luar negeri, mendukung dan memperkuat diplomasi pemerintah
3. Fungsi pengawasan, mengawasi kebijakan luar negeri pemerintah
4. Fungsi jaringan internasional, membangun kerja sama antarparlemen dunia

Adapun tujuan diplomasi parlemen menurut Pusbangkom DPR RI (2026), meliputi:

- a. Memperjuangkan kepentingan nasional
- b. Meningkatkan kerja sama internasional
- c. Mendorong perdamaian dan stabilitas global
- d. Menyelesaikan isu global seperti konflik, HAM, dan lingkungan

Peran DPR RI dalam Hubungan Internasional

Sebagai sistem ketatanegaraan Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tidak hanya menjalankan fungsi domestik, tetapi juga memiliki peran strategis dalam hubungan internasional melalui diplomasi parlemen. Peran tersebut tidak terlepas dari tiga fungsi utama DPR RI, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Ketiga fungsi ini dijalankan dalam kerangka representasi rakyat serta untuk mendukung kebijakan luar negeri pemerintah, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Pada hubungan internasional, fungsi-fungsi tersebut berkembang menjadi peran yang lebih luas, seperti memberikan persetujuan terhadap perjanjian internasional, mengawasi pelaksanaan politik luar negeri, serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan diplomasi.



Gambar 1. Peran DPR RI di Organisasi Internasional

Sumber: Pusbangkom DPR RI (2026).

Keterlibatan DPR RI dalam hubungan internasional juga memiliki landasan hukum yang kuat. Secara konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 memberikan dasar bagi keterlibatan DPR dalam urusan luar negeri, khususnya melalui Pasal 11 yang mengatur perjanjian internasional, Pasal 13 terkait pengangkatan duta, serta Pasal 20 mengenai fungsi legislasi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri menegaskan bahwa pelaksanaan hubungan luar negeri tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga aktor non-pemerintah, termasuk lembaga legislatif seperti DPR RI (Pusbangkom DPR RI, 2026). Penguatan peran DPR juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, yang menegaskan bahwa DPR memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan politik luar negeri. Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib memberikan pedoman teknis terkait pelaksanaan diplomasi parlemen, termasuk tugas dan fungsi Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP).

DPR RI berperan sebagai aktor hubungan internasional melalui diplomasi parlemen yang dijalankan secara institusional, terutama melalui BKSAP. Melalui mekanisme ini, DPR RI tidak hanya terlibat dalam berbagai forum internasional, tetapi juga menjalin komunikasi aktif dengan parlemen negara lain. Peran tersebut mencerminkan fungsi DPR sebagai representasi nasional, di mana lembaga ini menyuarakan kepentingan rakyat Indonesia di tingkat global. Di sisi lain, DPR RI juga berperan sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan diplomasi, yang artinya diplomasi parlemen tidak menggantikan diplomasi eksekutif, melainkan melengkapinya (Pusbangkom DPR RI, 2026). Selain itu, DPR RI turut berperan dalam membentuk opini global melalui partisipasinya

dalam forum-forum internasional, sehingga dapat mempengaruhi arah pembahasan isu-isu strategis dunia.

Sebagai pelaksana utama diplomasi parlemen, BKSAP memiliki peran strategis dalam mengoordinasikan berbagai aktivitas hubungan internasional DPR RI. BKSAP bertugas membina dan mengembangkan kerja sama antarparlemen, menjalin hubungan bilateral dan multilateral, serta mengikuti berbagai forum internasional (Pusbangkom DPR RI, 2026). Selain itu, BKSAP juga memberikan rekomendasi kepada pimpinan DPR terkait isu-isu kerja sama internasional. Dalam pelaksanaannya, BKSAP mengelola berbagai kegiatan diplomasi, seperti kunjungan kerja luar negeri, penerimaan delegasi asing, pembentukan Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB), serta partisipasi aktif dalam forum internasional.

Melalui BKSAP, DPR RI juga terlibat dalam berbagai organisasi internasional antarparlemen, seperti *Inter-Parliamentary Union*, *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly*, *Parliamentary Union of the OIC Member States*, *Asian Parliamentary Assembly*, serta *Asia Pacific Parliamentary Forum*. Melalui keikutsertaan dalam forum-forum tersebut DPR RI tidak hanya menyuarakan kepentingan nasional, tetapi juga berkontribusi dalam penyelesaian berbagai isu global serta memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional. Diplomasi parlemen yang dijalankan DPR RI memiliki karakteristik yang khas dibandingkan diplomasi pemerintah. Diplomasi ini cenderung lebih fleksibel karena tidak terlalu terikat oleh protokol formal kenegaraan, sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi yang lebih terbuka dan dialogis.

Diplomasi parlemen bersifat partisipatif karena melibatkan representasi rakyat secara langsung dalam proses hubungan internasional. Dampak yang dihasilkan pun umumnya bersifat jangka panjang dan tidak langsung (*intangible*), seperti peningkatan kepercayaan antarnegara dan penguatan hubungan bilateral. DPR RI juga berperan sebagai jembatan komunikasi yang efektif dalam menjalin hubungan antarnegara. Saat ini peran DPR RI dalam hubungan internasional menjadi semakin penting karena kompleksitas isu global, seperti perubahan iklim, konflik internasional, dan hak asasi manusia, menuntut keterlibatan berbagai aktor, termasuk parlemen. Diplomasi tidak lagi dapat dilakukan secara eksklusif oleh pemerintah, melainkan membutuhkan pendekatan multi-aktor yang lebih inklusif. Oleh karena itu, DPR RI melalui diplomasi parlemen berfungsi sebagai pelengkap diplomasi pemerintah, representasi rakyat di tingkat global, serta instrumen strategis dalam memperkuat posisi Indonesia dalam hubungan internasional.

Peran BKSAP dalam Diplomasi Parlemen

Dalam pelaksanaan diplomasi parlemen, Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) merupakan aktor utama yang menjalankan fungsi hubungan internasional di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). BKSAP berperan sebagai ujung tombak diplomasi parlemen yang menghubungkan DPR RI dengan parlemen negara lain serta berbagai organisasi internasional. Keberadaan dan kewenangan BKSAP memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018, serta Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib.

Dengan dasar hukum tersebut, BKSAP memiliki legitimasi institusional untuk menjalankan peran diplomasi parlemen sebagai bagian dari hubungan luar negeri Indonesia.

BKSAP memiliki tugas untuk membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan kerja sama antarpemerintah, baik secara bilateral maupun multilateral. Dalam menjalankan tugas tersebut, BKSAP berfungsi menjalin hubungan dengan parlemen negara lain, mengembangkan kerja sama dengan organisasi internasional, serta menghadiri dan menyelenggarakan forum-forum internasional. Selain itu, BKSAP juga berperan dalam memberikan rekomendasi kepada pimpinan DPR RI terkait isu-isu strategis dalam kerja sama internasional, serta melakukan kajian terhadap berbagai isu global yang relevan dengan kepentingan nasional. Tidak hanya pada level strategis, BKSAP juga menjalankan fungsi teknis, seperti mengoordinasikan kunjungan luar negeri DPR, menerima delegasi parlemen asing, mengevaluasi hasil kegiatan diplomasi, serta menyusun laporan dan rekomendasi kebijakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan (dpr.go.id. 2026).

Pusbangkom DPR RI (2026), menyebutkan bahwa BKSAP menjalankan diplomasi parlemen melalui beberapa mekanisme kerja sama internasional yang terstruktur, mencakup:

- Pertama, kerja sama bilateral yang dilakukan melalui pembentukan Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB), yang bertujuan mempererat hubungan antara DPR RI dengan parlemen negara tertentu secara lebih fokus dan berkelanjutan.
- Kedua, kerja sama regional yang dilakukan melalui forum kawasan, khususnya di tingkat Asia Tenggara, yang berfokus pada isu-isu regional seperti stabilitas kawasan, kerja sama ekonomi, dan integrasi regional.
- Ketiga, kerja sama multilateral yang dilaksanakan melalui organisasi internasional antarpemerintah, yang memungkinkan DPR RI terlibat dalam pembahasan isu-isu global seperti perdamaian, perubahan iklim, dan hak asasi manusia.
- Keempat, diplomasi melalui forum internasional, yaitu partisipasi aktif dalam berbagai sidang, konferensi, dan pertemuan global, di mana DPR RI menyampaikan posisi dan kepentingan nasional secara resmi.

Melalui hubungan organisasi internasional, BKSAP menjadi penghubung utama DPR RI dengan berbagai organisasi antarpemerintah dunia, seperti *Inter-Parliamentary Union* (IPU), *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly* (AIPA), *Parliamentary Union of the OIC Member States* (PUIC), *Asian Parliamentary Assembly* (APA), dan *Asia Pacific Parliamentary Forum* (APPF). Melalui organisasi-organisasi tersebut, BKSAP mengirim delegasi DPR RI untuk berpartisipasi dalam forum internasional, terlibat dalam penyusunan resolusi, menyuarakan kepentingan nasional, serta membangun jaringan diplomasi global. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa BKSAP tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai aktor strategis dalam membentuk arah diplomasi parlemen Indonesia di tingkat global.

BKSAP memiliki peran strategis dalam diplomasi parlemen. Pertama, sebagai koordinator diplomasi parlemen, BKSAP mengatur dan mengoordinasikan seluruh aktivitas hubungan

internasional DPR RI agar berjalan secara terarah dan konsisten. Kedua, sebagai fasilitator kerja sama internasional, BKSAP menjembatani komunikasi antara DPR RI dengan parlemen negara lain maupun organisasi internasional. Ketiga, sebagai penyusun strategi diplomasi, BKSAP menyiapkan isu-isu strategis dan posisi yang akan dibawa oleh delegasi DPR RI dalam forum internasional. Keempat, sebagai pendukung kebijakan luar negeri, BKSAP memberikan masukan kepada DPR yang pada akhirnya dapat mendukung arah kebijakan luar negeri pemerintah.

Pada perspektif teori hubungan internasional, BKSAP juga memiliki posisi penting dalam kerangka *multi-track diplomacy*. BKSAP dapat dikategorikan sebagai aktor dalam *track 1.5 diplomacy*, karena berada di antara peran negara (eksekutif) dan representasi masyarakat (legislatif). Selain itu, BKSAP juga mencerminkan bentuk *second track diplomacy* karena memiliki fleksibilitas yang lebih tinggi dibandingkan diplomasi pemerintah. Posisi ini memungkinkan BKSAP untuk membuka jalur komunikasi alternatif antarnegara, mengurangi potensi ketegangan, serta mendorong dialog yang lebih inklusif dan konstruktif dalam forum internasional.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa BKSAP merupakan aktor kunci dalam pelaksanaan diplomasi parlemen Indonesia. Perannya tidak hanya terbatas pada aspek administratif, tetapi juga mencakup fungsi strategis dalam membangun hubungan internasional, memperkuat posisi Indonesia di tingkat global, serta memastikan bahwa kepentingan nasional tetap terakomodasi dalam dinamika politik internasional. Keberadaan BKSAP menjadi sangat penting dalam mendukung efektivitas diplomasi parlemen sebagai bagian dari sistem hubungan luar negeri Indonesia yang semakin kompleks di era globalisasi.

Implementasi Diplomasi Parlemen DPR RI

Implementasi diplomasi parlemen oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) merupakan wujud konkret dari keterlibatan lembaga legislatif dalam hubungan internasional. Tidak hanya berhenti pada tataran konseptual dan kelembagaan, diplomasi parlemen dijalankan secara aktif melalui berbagai forum internasional, kerja sama antarparlemen, serta respons terhadap isu-isu global yang berkembang. Kegiatan ini sebagian besar dikoordinasikan oleh Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) sebagai pelaksana utama diplomasi parlemen di lingkungan DPR RI. Salah satu bentuk implementasi yang paling nyata terlihat dari partisipasi DPR RI dalam berbagai organisasi internasional antarparlemen, seperti *Inter-Parliamentary Union* dan *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly*. Dalam forum IPU, DPR RI berperan aktif dalam membahas berbagai isu global yang menjadi perhatian bersama masyarakat internasional, termasuk perdamaian dunia, hak asasi manusia, perubahan iklim, serta pembangunan berkelanjutan. Melalui keikutsertaan dalam sidang-sidang IPU, DPR RI tidak hanya menyampaikan posisi resmi Indonesia, tetapi juga terlibat dalam proses penyusunan resolusi yang menjadi acuan bagi parlemen di berbagai negara. Hal ini menunjukkan bahwa diplomasi parlemen memiliki kontribusi dalam membentuk norma dan arah kebijakan global secara kolektif (Yustitiningtyas, et al., 2025).

Di tingkat regional, keterlibatan DPR RI dalam forum AIPA juga mencerminkan peran strategis Indonesia dalam memperkuat kerja sama kawasan Asia Tenggara. Di forum ini DPR RI turut mendorong integrasi regional melalui pendekatan dialogis antarparlemen, serta berkontribusi dalam pembentukan berbagai resolusi yang berkaitan dengan stabilitas kawasan, kerja sama ekonomi, dan isu sosial. Bahkan dalam beberapa kesempatan DPR RI menunjukkan peran kepemimpinan dengan menjadi penggerak agenda kerja sama regional, yang sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor penting dalam diplomasi parlemen di kawasan ASEAN (dpr.go.id, 2026).

Selain melalui forum formal, implementasi diplomasi parlemen DPR RI juga tercermin dalam keterlibatan aktif terhadap berbagai isu global, khususnya isu kemanusiaan. Salah satu contoh yang menonjol adalah respons DPR RI terhadap krisis kemanusiaan Rohingya di Myanmar. Dalam konteks ini, diplomasi parlemen digunakan sebagai sarana untuk menyuarakan keprihatinan, mendorong perhatian internasional, serta memperkuat tekanan moral terhadap pihak-pihak terkait agar segera mencari solusi damai. Peran ini menunjukkan bahwa diplomasi parlemen tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap diplomasi pemerintah, tetapi juga sebagai instrumen advokasi yang membawa nilai-nilai kemanusiaan dalam forum internasional (Ainurrofiq & Kurniawan, 2022).

Selain isu kemanusiaan, DPR RI melalui BKSAP juga aktif merespons dinamika konflik internasional yang berpotensi mengganggu stabilitas global. Salah satu contohnya adalah sikap BKSAP yang mengecam tindakan militer sepihak Amerika Serikat terhadap Iran di tengah berlangsungnya upaya diplomasi damai. BKSAP menilai tindakan tersebut tidak hanya memperburuk konflik, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap mekanisme diplomasi internasional dan prinsip multilateralisme (emedia.dpr.go.id. 2025).

Melalui pernyataan tersebut, BKSAP menegaskan pentingnya penyelesaian konflik melalui jalur dialog dan diplomasi, serta menolak penggunaan kekuatan militer sebagai solusi utama dalam sengketa internasional. Sikap ini menunjukkan bahwa DPR RI tidak hanya berperan sebagai peserta dalam forum internasional, tetapi juga sebagai aktor yang secara aktif mendorong nilai-nilai perdamaian dan stabilitas global. Dengan demikian, hubungan DPR RI dengan organisasi internasional juga tercermin dalam upaya memperkuat mekanisme diplomasi global serta mendukung peran lembaga internasional dalam menjaga perdamaian dunia.

Selanjutnya, DPR RI melalui BKSAP juga menunjukkan peran aktif dalam merespons isu kemanusiaan global, seperti penutupan perbatasan Rafah oleh Israel, BKSAP mengecam kebijakan tersebut karena dinilai menghambat akses bantuan kemanusiaan dan melanggar prinsip hukum internasional (dpr.go.id. 2026). Di tingkat kawasan, dukungan DPR RI semakin kuat melalui forum *Asian Parliamentary Assembly (APA)* dan *Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC)*, yang mayoritas anggotanya konsisten mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.



Gambar 2. Peran Diplomasi Parlemen Indonesia Terhadap Isu Palestina
Sumber: Pusbangkom DPR RI, (2026).

Selain itu, BKSAP mendesak Dewan Keamanan PBB untuk segera mengambil tindakan. Sikap ini menunjukkan bahwa hubungan DPR RI dengan organisasi internasional tidak hanya melalui partisipasi forum, tetapi juga melalui upaya mendorong lembaga internasional untuk bertindak. Dengan demikian, diplomasi parlemen berfungsi sebagai instrumen strategis dalam memperjuangkan isu kemanusiaan dan memperkuat posisi Indonesia di tingkat global.

Di samping itu, DPR RI juga aktif dalam merespons isu perubahan iklim yang semakin menjadi perhatian global. Melalui diplomasi parlemen, DPR RI mendorong pentingnya prinsip keadilan iklim, khususnya bagi negara berkembang yang memiliki keterbatasan dalam menghadapi dampak perubahan iklim (Rizkiah & Burhanuddin, 2024). DPR RI menekankan perlunya kerja sama global yang adil, termasuk dalam hal transfer teknologi, pendanaan iklim, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia. Hal ini menunjukkan bahwa diplomasi parlemen tidak hanya bersifat politis, tetapi juga substantif dalam membahas isu-isu strategis yang berdampak luas bagi masyarakat global.

Sebagai negara kepulauan yang berada di *ring of fire* dan memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, diplomasi perubahan iklim menjadi salah satu fokus utama DPR RI dalam forum internasional. BKSAP mendorong prinsip *common but differentiated responsibility*, di mana negara maju harus menanggung tanggung jawab lebih besar atas dampak perubahan iklim karena industrialisasi yang mereka titik beratkan pada tiga aspek penting: investasi untuk mitigasi, transfer teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia (Pusbangkom DPR RI, 2026).

Pada pembangunan berkelanjutan, DPR RI turut berperan dalam mendukung implementasi *Sustainable Development Goals (SDGs)*. Peran ini dilakukan melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran yang dimiliki DPR RI, serta melalui diplomasi parlemen yang mendorong kerja sama internasional dalam mencapai target pembangunan global (Pusbangkom DPR RI, 2026). Dengan demikian, DPR RI tidak hanya berkontribusi di tingkat nasional, tetapi juga dalam upaya kolektif masyarakat internasional untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Namun implementasi diplomasi parlemen DPR RI tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah perlunya koordinasi yang lebih kuat antara DPR RI dan pemerintah dalam pelaksanaan politik luar negeri, agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan. Selain itu, dinamika

politik global yang semakin kompleks juga menuntut DPR RI untuk memiliki kapasitas analisis yang lebih mendalam serta dukungan data yang akurat dalam setiap aktivitas diplomasi. Tantangan lainnya adalah bagaimana memastikan bahwa diplomasi parlemen benar-benar mampu merepresentasikan kepentingan nasional secara konsisten di tengah berbagai kepentingan global yang beragam.

Implementasi diplomasi parlemen oleh DPR RI menunjukkan perkembangan yang signifikan. Keterlibatan aktif dalam berbagai organisasi internasional, respons terhadap isu global, serta kontribusi dalam pembentukan kerja sama internasional menunjukkan bahwa diplomasi parlemen telah menjadi instrumen penting dalam memperkuat posisi Indonesia di kancah global. Dengan pendekatan yang lebih fleksibel, dialogis, dan inklusif, diplomasi parlemen mampu melengkapi diplomasi pemerintah sekaligus memperluas ruang partisipasi Indonesia dalam tata kelola global. Untuk itu implementasi diplomasi parlemen DPR RI tidak hanya mencerminkan peran lembaga legislatif dalam hubungan internasional, tetapi juga menunjukkan bahwa parlemen memiliki kontribusi nyata dalam menciptakan hubungan internasional yang lebih adil, damai, dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hubungan antara DPR RI dengan organisasi internasional terjalin melalui mekanisme diplomasi parlemen yang bersifat kelembagaan, partisipatif, dan strategis. Hubungan tersebut diwujudkan dalam bentuk keanggotaan dan partisipasi aktif DPR RI dalam berbagai organisasi internasional antarparlemen, seperti *Inter-Parliamentary Union (IPU)* dan *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA)*, yang memungkinkan DPR RI untuk terlibat dalam forum dialog global, penyusunan resolusi, serta pembahasan isu-isu strategis internasional. Hubungan tersebut juga tercermin melalui peran DPR RI sebagai representasi rakyat Indonesia di tingkat global, yang menyuarakan kepentingan nasional sekaligus berkontribusi dalam pembentukan norma dan kebijakan internasional. Diplomasi parlemen menjadi instrumen yang menjembatani hubungan antara DPR RI dengan organisasi internasional, sehingga tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga memiliki dimensi substantif dalam memperkuat posisi Indonesia dalam sistem hubungan internasional.

PENUTUP

Kesimpulan

Hubungan antara DPR RI dengan organisasi internasional terjalin secara nyata melalui mekanisme diplomasi parlemen yang dijalankan secara institusional, terutama oleh BKSAP. Hubungan tersebut diwujudkan melalui partisipasi aktif DPR RI dalam berbagai organisasi antarparlemen seperti *Inter-Parliamentary Union* dan *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly*, yang memungkinkan DPR RI terlibat dalam forum dialog global, penyusunan resolusi, serta pembahasan isu-isu internasional. Melalui diplomasi parlemen, DPR RI tidak hanya berperan sebagai peserta, tetapi juga sebagai aktor strategis yang menyuarakan kepentingan nasional, membangun kerja sama internasional, serta mendorong penyelesaian isu global seperti konflik, kemanusiaan, dan perubahan iklim. Dengan begitu, diplomasi parlemen menjadi instrumen utama

yang menghubungkan DPR RI dengan organisasi internasional secara aktif, substantif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam sistem hubungan internasional.

Saran

DPR RI melalui BKSAP perlu memperkuat efektivitas diplomasi parlemen dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan politik luar negeri. Selain itu, DPR RI perlu mengoptimalkan peran dalam organisasi internasional seperti *Inter-Parliamentary Union* dan *ASEAN Inter-Parliamentary Assembly* melalui peningkatan kapasitas diplomasi, konsistensi posisi nasional, serta pemanfaatan forum internasional secara lebih strategis. Dengan demikian, hubungan DPR RI dengan organisasi internasional tidak hanya bersifat partisipatif, tetapi juga mampu memberikan pengaruh nyata dalam pembentukan kebijakan global.

Daftar Pustaka

- Ainurrofiq, I., & Kurniawan, M. T. A. (2022). Diplomasi Parlemen: Peran Dpr-Ri Dalam Menanggapi Isu Pelanggaran Ham Kaum Rohingya Di Myanmar Tahun 2017–2018. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(11), 16108–16125.
- DPR RI. (2026). *Bksap Dpr Ri Kecam Penutupan Perbatasan Rafah Oleh Israel, Desak Dk Pbb Bertindak!* <https://www.dpr.go.id/kegiatan-dpr/berita/bksap-dpr-ri-kecam-penutupan-perbatasan-rafah-oleh-israel-desak-dk-pbb-bertindak-60294>
- DPR RI. (2026). *Sekretariat Jenderal Dpr Ri*. <https://www.dpr.go.id/tentang-dpr/setjen-dpr>
- E-Media DPR RI. (2025). *Bksap Kecam Serangan Unilateral As Terhadap Iran Di Tengah Upaya Diplomasi Damai*. <https://emedia.dpr.go.id/news/2025/06/25/bksap-kecam-serangan-unilateral-as-terhadap-iran-di-tengah-upaya-diplomasi-damai>.
- Marzuki, M., Septiyan, F. D., & Batubara, M. W. A. (2025). Diplomasi Dan Komunikasi Politik Internasional. *Mudabbir Journal Research And Education Studies*, 5(2), 1209–1221. <https://doi.org/10.56832/mudabbir.v5i2.1382>.
- Nurkholis, M., Malika, E. R., Nugraha, A., & Umar, S. (2025). Peran Komisi I Dpr Ri Dalam Membantu Penyelesaian Kasus Pekerja Migran Indonesia (Pmi) Di Luar Negeri. *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi*, 2(12), 1147–1163.
- Pusbangkom DPR RI. (2026). Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Legislatif Sekretariat Jendral DPR RI. Modul Edukasi Diplomasi Parlemen. <https://drive.google.com/drive/folders/1BoPx50CDe2xpXIBV3zfxvuHrjt5RfuMa>
- Rahmadani, N., & Sudiar, S. (N.D.). Peran Aipa Dalam Menanggulangi Sampah Plastik Di Indonesia Tahun 2021–2024.
- Rizqiah, L., & Burhanuddin, A. (2024). Peran Diplomasi Parlemen Indonesia Dalam Upaya Membantu Fiji Menghadapi Tantangan Keamanan Lingkungan. *Phenomenon: Multidisciplinary Journal Of Sciences And Research*, 2(1), 38–51. <https://doi.org/10.62668/Phenomenon.V2i01.1046>.

Yustitiantingtyas, L., Pratiwi, L. Y. E., & Setyowati, D. (2025, July). Posisi Indonesia Pada Organisasi Internasional: Peran Strategis Dalam Pembentukan Hukum Internasional. Dalam *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* (Hlm. 1–13).

LAMPIRAN

The screenshot shows the course page for 'Edukasi Diplomasi Parlemen'. The page features a search bar, navigation tabs (KELAS, PODCAST BerAKHLAK, PUSAT PENGETAHUAN, KEGIATAN, PANDUAN, BANTUAN), and a user profile icon. The course title is 'Edukasi Diplomasi Parlemen', with a status of 'online', 0 reviews, and 265 participants. A description states: 'Pelatihan tentang diplomasi parlemen bagi masyarakat umum. Program ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap kerja-kerja parlemen di kancah internasional. Selain membekali peserta dengan pengetahuan dasar mengenai diplomasi, program ini juga mendorong keterlibatan aktif dalam membangun kesadaran global melalui pendekatan berbasis komunitas dan refleksi kebangsaan.' A list of 'Yang kamu dapatkan' includes Pre-test, Mata Pelajaran, Post-test, and Klaim sertifikat. A yellow button labeled 'Ikuti Pelatihan' is visible.

The screenshot shows the 'MATERI PELATIHAN' page. The page includes a navigation bar with 'akila Ayo Kita Belajar Legislatif', 'KELAS', 'KEGIATAN', 'PANDUAN', and 'BANTUAN'. A breadcrumb trail reads: 'Belajar Saya | Pelatihan | Edukasi Diplomasi Parlemen | Klaim Sertifikat'. The main content is a table titled 'MATERI PELATIHAN' with the following data:

No	Materi	Jam Pelajaran (JP)
1	Introduction : Diplomasi Parlemen dan BKSAP	2 JP
2	Modul 1. Parlemen : Diplomasi Jalur Kedua (Second-Track Diplomacy)	2 JP
3	Modul 2. Kerangka Kelembagaan Diplomasi Parlemen Indonesia	2 JP
4	Modul 3. Mekanisme dan Strategi Diplomasi Parlemen	2 JP
5	Modul 4. Praktik Diplomasi Parlemen Indonesia	2 JP

On the right side, the 'Penerima Sertifikat' is identified as Nicholas Syahputra Hutahaean. Below this, there is a 'Tentang Pelatihan' section with a course banner and a yellow 'Download' button.

Pelatihan Edukasi Diplomasi Parlemen dari arahan Staf BKSAP DPR RI - Bagian Sekretariat Kerja Sama Organisasi Internasional